STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA PENDUNG HILIR KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI

e-ISSN: 2747-1578 p-ISSN: 2747-1659

ELENA LESTARI, MASNON, NURFITRI STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

elenalestari144@gmail.com masnonmsi@gmail.com fitrinur8833@gmail.com

ABSTRACT

Village government strategy in improving administrative services in the downstream pendung village, warm water sub-district, kerinci district. the purpose of this study was to examine village government strategy in improving administrative services in the downstream pendung village, warm water sub-district, kerinci district. This research uses descriptive qualitative with purposive sampling techniques as a determinant of research informant. The resultd showed that the village government's strategy in administrative services can be said to be running quite well and will further improve the existing administrative services un the downstream pendung village. The resultd showed that the improving human resources, improve village facilities, improve the work discipline of the village apparatus in the downstream village.

Keyword: strategy, village government, public services, village administration

ABSTRAK

Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif dengan teknik purposive sampling sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pelayanan administrasi desa pendung hilir sudah berajalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya sumber daya manusia, meningkatkan fasilitas desa, meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur desa di desa pendung hilir.

Kata kunci : Strategi, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik, Administrasi Desa.

I. PENDAHULUAN

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata tidak dapat diraba) yang telah terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan (Raminto dan Atik septi Winarsih:2015).

Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, minsalnya pelaynanan dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin mendirikan bangunan.

Pelayanan admnistrasi umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentua Peraturan perundang-undangan (Raminto dan Atik Septi Winarsih: 2015).

Salah satu penyelenggaraan pelayanan publik administrasi umum adalah instansi pemerintah,dan menjadi salah satu bagian paling penting dalam suatu instansi karena bidangnya yang selalu didepan dan berhadapan langsung dengan konsumen atau masyarakat.

Adapun masalah dilapangan di Desa Pendung Hilir merupakan salah satu desa yang berada diwilayah kabupaten kerinci yang selalu mendapatkan masalah didalam pelayanan administrasi. hal ini dikarenakan kurangnya minat perangkat-perangkat desa dalam pelayanan administrasi. Permasalahan atau fenomena/kesulitan yang didapatkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan tentang administrasi di desa pendung hilir diantaranya:

- 1. Kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer untuk kegiatan surat menyurat masih kurang minim.
- 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan tugas perangkat desa.
- 3. Kurangnya disiplinnya perangkat desa dalam menjalankan tugas,dimana sering terlambat masuk dan pulang cepat.
- 4. Tidak adanya pelatihan dalam hal administrasi kususnya mengoperasikan komputer. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten Kerinci.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun masalah atau fenomena yang sering terjadi dihadapi di desa pendung hilir tentang pelayanan administrasi adalah :

- 1. Masalah di dalam pelayanan admnistrasi di kantor kepala desa pendung hilir karena kurangnya minat perangkat desa dalam menjalankan tugasnya seperti masuk jam kantor di kantor kepala desa pendung hilir.
- 2. Strategi pelayanan administrasi harus ditingkatkan lagi dalam pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci.

JAN Maha e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 10, - Oktober 2022 p-ISSN: 2747-1659

3. Kemampuan kepala desa pendung hilir dalam pelaksanaam tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi masih minim atau belum terlaksana secara optimal.seperti pelaksanaan tugas administrasi tidak terlaksana dengan baik,dalam administrasi umum, ataupun dalam administrasi keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani Strategia (startos=militer dan ag=memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahann mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan (Setiawan Dimas, 2016).

Menurut David (1998:13) strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi ini serta memperoleh keunggulan bersaing. keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi ini baru lebih cepat dari pada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini. strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan suatu tindakan tertentu.

Throut (2001:10) Memutuskan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetetif, bagaimana membuat presepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi lebih baik.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau di sebut juga pemdes adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini di atur melalui Peraturan Pemerintahan No. 72 pasal 216 ayat (1) Undang Undangd Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintahan desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah JAN Maha e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 10, - Oktober 2022 p-ISSN: 2747-1659

tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan Lembaga musyawarah desa. Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah Kepala desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa Pemerintah desa sendiri berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintah di desa. Segala kegiatan yang di lakukan di desa tersebut di koordinir oleh Kepala Desa atau Kades. Menurut Bayu Suryaningrat Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di lakukan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan (Bayu Suryaningrat, 1970).

Desa merupakan organisai pemerintahan terendah yang langsung di bawah Camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian desa menjadi sumber utama dan pertama dari berbagai data dan keterangan yang di perlukan oleh pemerintahan dalam rangka dasar penyusunan rencana pembangunan daerah meupun nasional.

Menurut peraturan pemerintah, tugas pokok pemerintahan desa adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:

- 1.Penyelenggaraan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat dari anggota masyarakat.
- 3. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh anggota masyarakat.
- 4. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagai berikut :

a. Kepala desa

Bertugas menyelenggarkan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana pembangunan bidang perdesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan, dan kesehatan.
- 3. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.

b. Sekretaris desa

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan eksepedisi.
- 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, kantor, penyiapan rapat, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

c. Kepala urusan

e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 10, - Oktober 2022 p-ISSN: 2747-1659

berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. kepala urusan bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- 1. Kepala tata usaha dan umum memilki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan admnistrasi perangkat desa, inventarisasi, perialanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dana administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan Lembaga pemerintah lainnya.
- 3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, meninyentarisis data data, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

d. Kepala kewilayahan

atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya. untuk melaksanakan tugas kepala kewilayahan atau kepala dusun memilki fungsi:

- 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. kepala seksi bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - 1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksnakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarkat serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
 - 3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Pelayanan Administrasi

Pelayanan merupakan bagian dari administrasi oleh karena itu, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam sebuah teori-teori dan salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dan berbagai aktivitasnya yang bersangkutan dengan pemerintah, untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang terendah. hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (Unsdang-Undang No.32 Tahun 2004).

Pelayanan mempunyai dua istilah penting yang perlu diketahui yaitu melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Poerwadarminta, 1995:572).

Menurut Ubert (dalam umar husein 2004:2) definsisi administrasi dapat dilihat dari dalam pengertian sempit dan luas. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informan secara otomatis baik internal maupun eksternal dengan maksud meyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. sedangkan administrasi secara luas mempunyai arti sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dengan struktur serta mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan efektif dan efesien.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Pelayanan Publik

Diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapakan. dengan demikian pelayanan adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pada hakikat nya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi individual akan tetapi sebagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, tetapi berbagai kebutuhan akan kesehatan, Pendidikan dan lain-lain.

Pelayananan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, didaerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan Metode Desktiptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pelayanan administrasi dan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur desa pendung hilir. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelahaan dokumen.

Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ini sebagai instrument kunci, rekbik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

III. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Strategi Pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Pendung hilir, Kecamatan Air Hangat, kabupaten kerinci

Dalam beberapa penerapan administrasi pemerintahan desa, tentunya terdapat kendalakendala yang menghambat seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini tentu perlu di evaluasi untuk mencari solusi agar pelayanan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan JAN Maha e-ISSN : 2747-1578 Vol. 4 No. 10, — Oktober 2022 p-ISSN : 2747-1659

baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2016 pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hilir, diantaranya adalah:

1. Meningkatknya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peran penting dakam proses keberhasilan suatu desa. Kualitas sumber daya manusia tentunya akan membawa suatu proses perubahan bagi desa. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tertib administrasi desa.

Selain itu, konstribusi sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan administrasi pemerintah desa. Namun, kulaitas sumber daya manusia di desa Pendung hilir ini masih dalam kategori rendah, sehingga ketertiban pemerintahan desa Pendung Hilir belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia di desa Pendung hilir ini seperti Pendidikan, jumlah penduduk, serta ekonomi.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh **Bapak Putra Yadi S.Pd selaku sekretaris desa Pendung hilir** mengatakan:

"Memang di desa Pendung Hilir ini masih rendah kualitas sumber daya manusianya, sehingga perlu untuk untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Nah, salah satu upaya kami dalam meningkatkan kuaitas sumber daya manusia adalah Pendidikan, terutama untuk aparatur pemerintahan desa agar dapat menjalankan atau mewujudkan tertib administrasi agar kedepan proses administrasi di desa kita ini dapat lebih baik" (wawancara, Sabtu 01 Januari 2022 jam 10:00).

Selanjutnya, Bapak Danus selaku Kasi Pelayanan desa Pendung hilir menjelaskan:

"Upaya yang pertama kami lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah mengikuti pelatihan dan sosialisasi agara administrasi desa Pendung hilir dapat tertib dan juga bisa mensejahterakan masyarakat desa Pendung hilir sehingga juga berdampak kepada kemajuan desa" (wawancara, Sabtu 01 januari 2022 jam 10:50).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di desa Pendung hilir Kecamatan Air hangat Kabupaten Kerinci memang memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga salah satu upaya dalam menerapkan administrasi desa yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat desa Pendung hilir saat ini sedang berupaya meningkatkan Pendidikan serta mengikuti pelatihan dan mengadakan sosialisasi guna terwujudnya tertib administrasi desa yang telah dijelaskan dalam permendagri nomor 47 tahun 2916 tentang administrasi pemerintahan desa.

2. Meningkatkan Fasilitas Desa

Salah satu aspek yang seharusnya diperhatikan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yaitu fasilitas. Karena jika fasilitas tidak memadai maka kelancaran dalam penerapan administrasi yang baik itu menjadi terhambat. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana atau alat penunjang keberhasilan suatu proses atau upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila fasilitas tidak tersedia atau tidak memadai maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Tibar Tono S.E selaku kepala desa Pendung hilir

JAN Maha e-ISSN : 2747-1578 Vol. 4 No. 10, — Oktober 2022 p-ISSN : 2747-1659

mengatakan:

"Ya kalau di desa kita ini perlu ada peningkatan fasilitas desa karena juga dapat berpengaruh terhadapa penerapan administrasi desa, selama ini fasilitas kita sangat tidak memadai dan juga kadang tidak bisa digunakan. Kedepan kita berusaha untuk meningkatkan lagi fasilitas guna untuk menertibkan adminstrasi di desa Pendung hilir" (wawancara Rabu 03 janauri 2022 jam 09:10).

Selanjutnya Bapak Danus selaku kaur pelayanan desa Pendung hilir memberi pendapat:

"Selama ini desa kita ini memang fasilitas tidak memadai, harapan kami sebagai aparat desa akan mempergunakan dana-dana desa dengan baik, agar digunakan untuk menambah atau membeli alat komputer dan alat yang berhubungan dengan administrasi desa, dan akan memberi pelayanan administarsi desa dengan sebaik baik nya untuk masyarakat yang ada di desa pendung hilir" (wawancara, Rabu 03 Januari 2022 jam 09:50).

Dari hasil wawancara penulis diatas, diketahui bahwa fasilitas yang ada di desa Pendung hilir ini kurang dan tidak memadai, hal ini berpengaruh terhadap penerapan administrasi desa dan pelayanan publik, sehingga aparatur desa dan masyarakat mengupaya untuk meningkatkan fasilitas desa, agar tugas-tugas desa dapat diselesaikan secara efektif dan efesien sehingga tidak lagi kendala dalam sistem administrasi.

3. Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Desa

Selain meningkatkan sumber daya manusia fasilitas, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pendung hilir dalam meningkatkan pelayanan administrasi adalah dengan meningkatkan disiplin kerja dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini dilakukan, demi mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang patuh terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, agar senantiasa aturan-aturan tersebut sepenuhnya akan diterapkan dan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa Pendung hilir.

Menurut Bapak Egi Fernando S.Pd selaku kaur umum desa Pendung hilir mengatakan:

"Kedisiplinan para aparatur desa sangat mempengaruhi terhadap sistem adminsitrasi desa, jadi untuk kedepan kepala desa harus selalu menekankan kepada aparatur desa agar meningkatkan kedisiplinan, patut dan taat kepada peraturan dan tanggung jawab dengan jabatanyang dibebankan agar tewujudnya administrasi yang tertib yang sebagimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan" (wawancara Rabu 05 Januari 2022 jam 09:30).

Selanjutnya Bapak Tibar Tono S.E sebagai kepala desa Pendung hilir mengatakan:

"Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menerapkan kedisiplinan kerja pada aparatur peemrintahan desa, patuh dan taat kepada peraturan serta tanggung jawab pada jabatan, dan saya selaku kepala desa sangat berharap dengan peningkatan kedisiplinan kerja aparatur pemerintahan desa dapat mewujudkan adminsitrasi yang tertib, dan tidak ada lagi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat" (wawancara Rabu 05 Januari 2022 jam 10:10).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dicermati bahwa di desa Pendung hilir Kecamatan air hangat saat ini memang sangat diperhatikan masalah desa kedisplinan dari aparatur pemerintahan desa ketika melakukan tugas-tuagsnya hal ini ditujukan bahwa denagn emningkatkan kedisplinan kerja aparatur pemerintahan desa Pendung hilir salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pendung hilir untuk bisa memenuhi serta melaksanakan seluruh peraruran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar nantinya bisa meningkatkan

e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 10, - Oktober 2022 p-ISSN: 2747-1659

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Pendung hilir dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi yaitu pertama meningkatkan sumber daya manusia. Kedua meningkatkan fasilitas desa yang ketiga meningkatkan kedisiplinan kerja dari pada aparatur pemerintah desa Pendung hilir.

IV. PEMBAHASAN

Upaya pemerintah desa dalam memberi pelayanan administrasi kepada masyarakat desa pendung hilir

Administrasi pemerintahan memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah vang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang baru harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa telah dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi umum, administrasi Kependudukan.

Administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi permusyawaratan desa. Pelaksanaan administrasi desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggrakan administrasi desa yang efektif. Menanggapi bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, sebenarnya sebagian sudah diterapkan, namun ada beberapa kendala serta kekurangan dalam mengoptimalkan administrasi desa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa di desa Pendung Hilir ini memang belum menjalankan Pelayanan Administrasi desa dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Pada tahap pelaksanaa pelayanan administrasi desa di desa Pendung hilir ini amsih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan yang ditentukan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparatur desa tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat, selama ini aparatur desa hanya melakukan tugas-tugas yang mereka ketahui saja jika mereka tidak mengetahui mereka tidak membuatnya, memberi pelayanan yang seadanya kepada masyarakat. seharusnya, kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan pengetahuan yang luas mengenai administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan administrasi yang baik. Di samping itu, kurangnya sumber daya manusia di desa Pendung Hilir juga merupakan faktor penghambat Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi, karena administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, apabila sumber daya manusianya cukup serta kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kapasitas serta kapabilitas dari para pelaku yang mengelola administrasi desa dapat menentukan kemajuan dari suatu desa, karena implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam hal ini, desa Pendung Hilir dapat dikatakan belum melaksanakan administrasi desa dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hiir kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa masih belum diselenggarakan dengan baik oleh aparatur pemerintah desa, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparatur desa tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat.
- 2. Kurangnya sumber daya manusia dari pada aparatur pemerintah desa pendung hilir, hal ini dibuktikan tidak mampunya aparatur pemerintahan desa dalam mengupayakan agar pemerintahan desa pendung hilir dapat tertib administrasinya.
- 3. a. meningkatkan sumber daya manusia
 - b. meningkatkan fasilitas desa
 - c. meningkatkan kedisplinan kerja aparatur desa

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adi sutopo, 2006. *Pelayanan prima*. Lembaga Admnistrasi Negara. Amin Hadi, Haryono, 1998. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia Hanif Nurcholis, 2005. *Teori Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, OT Grasindo Jakarta Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta

GP Press

Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: GP Press Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing JokoWidodo, 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV.Mitra Malang Lijan Poltak Sinabela, 2006. *Reformasi Prlayanan Publik*. PT.Bumi Aksara.

Marbun B,N. 2008. Proses Pembangunan Desa, Jakarta: Erlangga

Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksar

Nana Syadiah Sukma Dinata,2002. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosda Karya

Nasution, 2012. Metode Research Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara

Richard Me Ginn, 2007. Cerite-Cerite Ejang Abes, MUrsi Rawas: Pemkas Musi Rawas

Subarsono, 2008. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif,kualitatif dan R&D, Bandung Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian, Jakarta: RinekaCipta

TahlizuduhuNdraha, 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa, Jakarta: Bumi Aksara